

**DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN *POSITIONING*
IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN *POSITIONING*
IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2014**

Yeby Ma'asan Mayrudin

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Yeby.mayrudin@gmail.com

***Abstract:** This article examines the phenomenon of shifting the ideological positioning on political parties in the 2014 election. It's also presents the mapping of ideological positioning of parties. The main argument are created by the political parties in the 2014 election seemed to exercise a shifting in ideological positioning. In addition, this research also succeeded in characterizing the shifting typology of party in the 2014 election, at least there are three patterns: conservative, progressive conservatist, and extremist.*

***Keywords:** Political Parties, Positioning Ideology, Election 2014*

Pendahuluan

Tulisan ini menganalisa fenomena pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Seperti kita ketahui, partai politik sebagai lembaga intermediari mengalami dinamika tersebut menjelang pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada tahun ini. Sebagai contoh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang berasaskan ideologikan Islam mencoba

melakukan pergeseran ke tengah dengan harapan menghasilkan perolehan suara yang maksimum. Demikian juga dengan partai Nasionalis-Sekuler, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P (Bahkan PDI-P sejak 2007, sengaja mendirikan organisasi sayap partai berbasis Islam yang diberi nama Baitul Muslimin Indonesia-BAMUSI). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerindra yang juga melakukan

pergerakan dari kiri ke tengah dengan harapan yang sama.

Fenomena pasca pemilu 2004 dan 2009, setidaknya menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia. Hal demikian membuat arah perjuangan partai tidak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lainnya. Menurut Macridis, dalam kondisi yang berkembang seperti itu, partai politik menjadi sangat pragmatis, dikarenakan tidak lagi melibatkan masalah ideologis (Macridism, 1996:23) yang ketat sehingga faktor atau perdebatan ideologi semakin mengikis dan kabur. Di samping itu juga, basis ideologi yang semakin luntur pemaknaannya oleh partai dan/atau elitnya, dikarenakan mereka lebih memfokuskan pada bagaimana meraih kekuasaan dan memenangi pemilu. Sehingga dalam situasi seperti ini, menurut Kirchheimer akan menimbulkan fenomena pergeseran yang mendasari proses transformasi kepartaian dari partai ideologis ke bentuk *catch-all party*.

Lahirnya konsep *catch-all party*, sebenarnya didasari oleh kajian Downs tentang perspektif perilaku rasional. Ia berpendapat bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin mengutamakan prinsip-prinsip pragmatisme dan rasionalitas. Oleh karena itu, kehadiran *catch-all party* untuk menawarkan suatu program dan kebijakan umum, bukan menawarkan persoalan ideologis. Oleh karena itu, posisi dan fungsi partai politik mengalami perubahan fundamental dan mencairkan ketegangan antara “kubu kiri” dan “kubu kanan”. Format partai ini juga menerima pluralisme, bersikap inklusif, dan non-sektarian serta lebih mengedepankan pengembangan secara horizontal, menampung berbagai isu dan agenda dari berbagai kalangan di masyarakat (Imawan, 2004 : 11-13). Lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah pergeseran *positioning* partai ideologis ke bentuk *catch-all party* merupakan suatu keharusan?

Dalam prakteknya, pergeseran *positioning* ideologi partai-partai mendapatkan kritik tajam. Pertama,

konsepsi *catch-all party* tentang pragmatisme dan rasionalitas yang bertumpu pada model untung-rugi (*ibid*) telah menciptakan inkonsistensi tindakan partai dalam program dan kebijakan. Partai bersangkutan lebih mengutamakan tujuannya memenangkan setiap kontestasi politik. Ditambah lagi dengan dalil Downs yang menyatakan bahwa suatu partai dan elitnya harus memiliki keluwesan kebijakan untuk bergerak ke Kiri-Kanan, demi mencapai hasil yang maksimum (Klingemann, 2000:41). Menanggapi hal ini, publik merespons keras atas sikap partai politik dan elitnya. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2009, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik mencapai angka terendah yaitu 36% dibandingkan dengan lembaga lainnya. LSI juga merilis hasil temuannya tentang "*Party Identification*", yaitu masyarakat (pemilih) Indonesia yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik hanya berjumlah 20%. Bahkan berdasarkan survei mutakhir (Desember 2013) dari Lembaga

Survei Cirus didapatkan fakta bahwa hanya 9,4% masyarakat yang masih percaya terhadap partai politik. Riset menarik juga dihadirkan oleh Johnson dalam tulisannya "*Anti-Party Reaction in Indonesia*" yang mencoba melakukan konfirmasi mengenai reaksi anti-partai di Indonesia. Dalam studinya itu, fenomena reaksi anti-partai yang tak terkendali menimbulkan delegitimasi terhadap partai dan demokrasi. Hal itu disebabkan karena pragmatisme politik yang melanda partai-partai politik di Indonesia (Johnson Tan, 2002:505).

Kritik kedua atas bentuk *catch-all party* adalah pereduksian ideologi partai politik. Pada konteks ini, partai dan elitnya diperbolehkan berpolitik tanpa alur, tanpa distorsi ideologis (Imawan, 2004: 11-13), dan tanpa memerdulikan ideologi (Klingemann, 2000:41.). Padahal seharusnya, ideologi menjadi *code of conduct* bagi partai, elite dan kadernya (Irawan, 2008:323). Tanpa dasar ideologi, suatu partai tidak dapat membuat patokan interpretasi dan evaluasi. Apabila hal demikian terjadi, maka fungsi memberikan

referensi kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh partai sebagai institusi, malah dipegang oleh elite sebagai individu. Pada akhirnya format *catch-all party* justru melahirkan rejim yang tidak demokratis (Imawan, 2004:13).

Bagaimanapun, dinamika pergeseran *positioning* ideologi partai-partai ke arah tengah atau berubah ke bentuk *catch-all party*, berdampak negatif bagi sistem kepartaian di Indonesia. Di samping partainya kehilangan jati diri, masyarakatnya pun akhirnya menjadi apatis bahkan antipati terhadap partai. Dan dalam kasus ini, jangankan partai-partai peserta pemilu 2014, tidak sadar telah mengalami dan/atau melakukan pergeseran *positioning* ideologinya. Oleh karena itu, penulis menilai penting untuk menggambarkan secara gamblang dinamika pergeseran *positioning* ideologi masing-masing partai.

Berangkat dari pendahuluan yang sudah penulis paparkan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peta ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014? (2) Bagaimana gambaran pergeseran

positioning ideologi partai-partai dalam pemilu 2014?

Tulisan ini difokuskan pada gambaran pergeseran *positioning* ideologi para kontestan pemilu 2014. Namun, penulis hanya akan mengkaji partai-partai lama dan berskala nasional. Jadi, 1 partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan 3 partai lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh, tidak akan penulis telusuri lebih dalam. Mengapa Partai Nasdem tidak diikutsertakan? Hal itu karena partai tersebut adalah partai yang baru akan memulai perannya dalam kancah perpolitikan di Indonesia dan juga belum memiliki *track record* memadai dalam kajian *positioning* ideologinya.

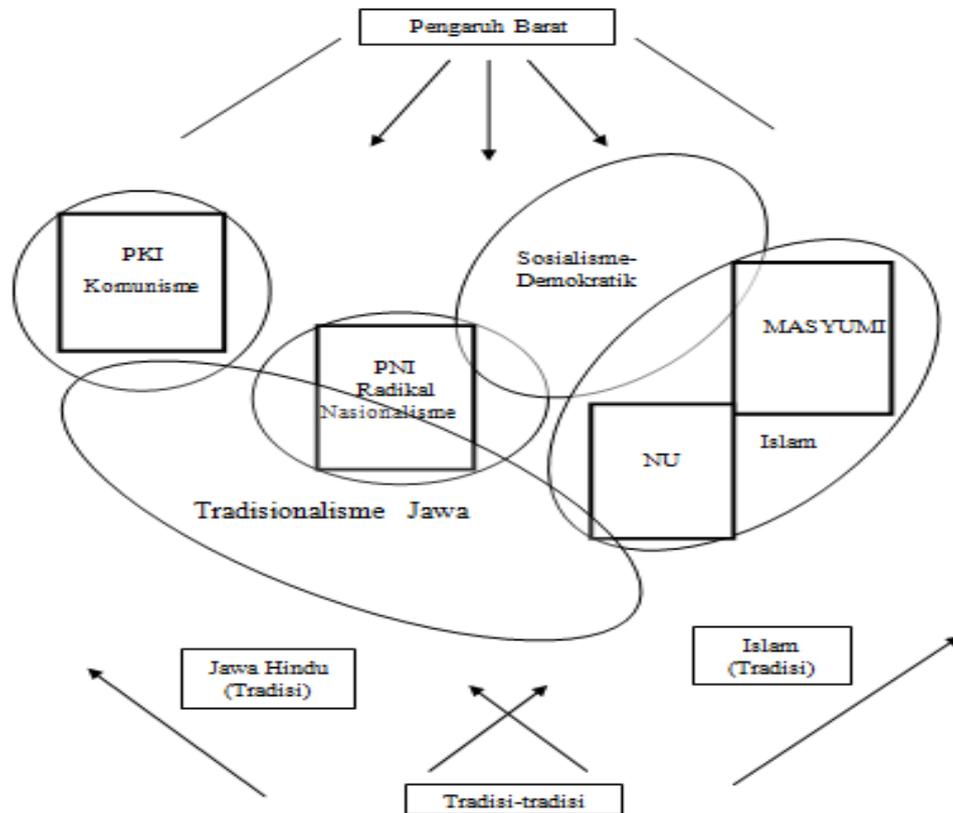
Diskursus Pemetaan Ideologi Partai Politik di Indonesia

Kajian pemetaan ideologi partai-partai politik di Indonesia, sudah sepatutnya mengacu pada karya-karya tokoh sebelumnya seperti Herbert Feith dan Lance Castle, Daniel Dhakidae dan Kevin Raymond Evans, yang menyajikan

gambaran dan skema menarik tentang pemetaan ideologi partai-partai politik di Indonesia yang antara satu tokoh dengan tokoh lainnya memiliki perbedaan khas masing-masing.

Feith dan Castle yang memfokuskan kajiannya pada fenomena kemenangan 4 partai politik di pemilu 1955 mencoba memetakan ideologi –istilah mereka “aliran pemikiran politik”– ke dalam lima macam: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme-Demokratis dan Komunisme (Feith dan Castle, 1998:241.). Pembagian tersebut menggambarkan aliran-aliran dalam kaitannya dengan ketegangan antara warisan-warisan

tradisional khusus serta kaitannya dengan dunia modern, terutama dunia Barat dan ide-idenya. Feith dan Castle melihat bahwa ada sifat ganda warisan-warisan tradisional Indonesia. Fakta bahwa tradisi Jawa yang lebih tua serta terjalin erat dengan tradisi Hindu dan Budha terpisah jelas dari Islam. Sementara itu pengaruh ideologis yang diambil dari dunia Barat tidak menunjukkan perbedaan tajam. Pengaruh yang paling kuat adalah Marxisme, baik dalam bentuk Leninisme maupun Sosialisme-Demokratik, sedangkan pengaruh demokrasi liberalnya jauh lebih lemah. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 1. Pemetaan Ideologi (Aliran Pemikiran Politik) Pada Pemilu 1955

Sumber: Feith dan Castle

Partai Komunis Indonesia (PKI) menurut Feith dan Castle merupakan partai dengan ideologi **Komunis** yang memiliki kesan kuat dalam memutuskan ikatan dengan masa lalu, dan mengambil konsep pemikiran –secara langsung maupun tidak langsung– berasal dari Barat, sekalipun mereka masih menggunakan himbauan dari corak abangan tradisional dan sejenisnya. Ideologi **Sosialisme-Demokratis** (SosDem) begitu mengakar dalam

tubuh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Meskipun demikian tidak sedikit elite Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi yang juga terpengaruh oleh gagasan dari kelompok SosDemo tersebut. Sementara itu, Nahdhatul Ulama (NU) dan Masyumi menjadi representasi politik dari corak pemikiran **Islam**. Namun, kedua partai tersebut berbeda dalam mengekspresikan ke-Islam-annya. NU adalah partai Islam yang akomodatif dan relatif

terpengaruh oleh pemikiran tradisionalisme Jawa. Sementara Masyumi adalah partai Islam yang memiliki kecenderungan reformis dan modernis. Sedangkan **Tradisionalisme Jawa** tercermin dalam diri Partai Indonesia Raya (PIR) yang bersifat ningrat. **Nasionalisme Radikal** terutama sekali direpresentasikan oleh PNI. Bagian ini merupakan perpaduan antara Tradisionalisme Jawa, Sosialisme Demokratik dan Komunisme.

Sementara itu, dalam konteks pemilu 1999, pemetaan ideologi partai-partai politik coba ditawarkan oleh Daniel Dhakidae dengan membagi partai ke dalam dua jalur utama: Jalur Kelas dan Aliran. Dhakidae berpendapat bahwa partai yang mengambil **Jalur Kelas** membedakan dirinya berdasarkan pandangan terhadap modal, yang membagi masyarakat atas kelas pemilik modal dan kamu buruh dengan segala kompleksitasnya. Pada jenis ini, dipilah menjadi dua kelompok yaitu **Developmentalisme** dan **Sosialisme Radikal**. Developmentalisme merupakan kelompok

yang berpihak kepada pemodal asing dan/atau domestik, melihat indikator itu, Dhakidae menegaskan bahwa Partai Golkar masuk dalam kelompok tersebut. Selanjutnya kelompok sosialisme demokratik yang berpihak pada kaum buruh, mengarah pada partai-partai progresif di antaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD). Sedangkan, partai yang mengambil **Jalur Aliran** membedakan dirinya berdasarkan pandangan terhadap dunia dan persoalannya, dan bagaimana cara memecahkannya. Pada jenis ini, partai-partai dipilah menjadi dua kelompok juga yaitu **Kelompok Agama** dan **Kelompok Kebangsaan**. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masuk dalam kategori kelompok agama. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi kelompok berbasis kebangsaan.

Dalam pemetaan di atas, Dhakidae berbeda dengan Feith dan Castle, terutama dalam menentukan sumber pengaruh ideologi. Apabila Feith dan Castle memasukkan tradisi Jawa-Hindu dan tradisi Islam sebagai pembentuk ideologi, sejajar

dengan pengaruh pemikiran Barat, Dhakidae mengesampingkan pengaruh tradisi tersebut. Baik variable agama, kebangsaan, developmentalisme, dan sosialisme, dalam kacamata Dhakidae kesemuanya adalah pengaruh dari Globalisme (Sugiono dan Mas'udi, 2008:14-15.).

Penjelasan lain tentang pemetaan kepartaian di Indonesia disampaikan oleh Kevin Raymond Evans. Melihat kondisi yang ada, Evans memilah garis ideologis partai politik di Indonesia secara sederhana dengan membagi dua kategori ideologi, yaitu Islam dan Sekuler yang ditempatkan dalam sumbu horizontal, sementara dalam sumbu vertikal menjadi dua kategori, yaitu Elitis dan Populis (Pahlevi, 2003:43). Pada garis ideologis, Evans menyatakan bahwa spektrum sosial Indonesia terbagi atas kalangan "kiri" atau sekuler dan "kanan" atau agama, dengan pembeda paling dasar bagaimana menempatkan agama dihadapan negara. Kalangan sekuler adalah keseluruhan entitas yang menolak pengkhususan terhadap entitas agama, khususnya Islam, dalam hubungannya dengan negara.

Sementara itu, kalangan agama adalah mereka yang mendukung transformasi agama dalam negara. Menelisik pemilu tahun 1999, PDI-P merepresentasikan entitas sekuler atau kiri, sedangkan PPP, PBB dan partai Islam lainnya merepresentasikan entitas agama atau kanan. Sementara belahan sumbu vertikal menggambarkan ikatan para elite partai terhadap konstituennya. Alhasil, terpilah menjadi konsentris elitis dan populis. Pada sisi elitis, menyatakan bahwa pertimbangan terhadap posisi kebijakan lebih utama dibandingkan pertimbangan atas loyalitas pribadi dan identifikasi kepada pimpinan nasional partai. Contohnya Partai Golkar dan PAN. Sementara itu pada sisi populis menyatakan bahwa ikatan dengan partai politik lebih bersifat emosional dan simbolik terhadap perumusan kebijakan-kebijakan. Contohnya PKB dan PDI-P.

Pemilu 2014 masih akan mengikuti model pluralisme ekstrem (Sartori, 1971:38), ditandai dengan 12 partai politik peserta pemilu nasional dan 3 partai lokal. Lalu pertanyaan yang muncul adalah

bagaimana peta ideologi partai-partai pada pemilu kali ini?

Ideologi partai politik tercermin dalam berbagai ranah, baik kebijakan dan perilaku kebijakan, maupun dokumen partai. Dalam tulisan ini, basis pemetaannya adalah dokumen normatif partai-partai politik, khususnya AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) masing-masing partai politik. Pemetaan ideologi partai dapat dilakukan dengan menelaah AD/ART partai politik. Khusus pada konteks Indonesia, pembilahan dapat dilakukan dengan melihat posisi partai dalam kaitannya dengan hubungan antara agama dengan negara.

Dalam pemetaan partai-partai politik di Indonesia, kajian yang telah disuguhkan oleh Dhakidae dan

Evans memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaanya adalah memetakan garis pertentangan ideologis nasionalis dengan Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penentuan sisi lainnya, Dhakidae menyuguhkan pada pengelompokan Developmentalisme dan Sosialisme Radikal, sedangkan Evans menyajikan perbedaan antara elitis dan populis. Untuk kebutuhan dalam tulisan ini, penulis hanya menggunakan pemetaan garis berdasarkan pertentangan ideologis tanpa menggunakan variabel lain seperti yang telah ditawarkan oleh Dhakidae –berlandaskan kelas– maupun Evans –berlandaskan relasi elite dengan konstituennya–. Berikut di bawah ini tabel pemetaan ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014.

Tabel 1. Pemetaan Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014

No Urut	Nama Partai	Asas/Ideologi	Identifikasi	Positioning
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Pancasila	Nasionalis-Sekuler	Kiri
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Pancasila dengan <i>prinsip ahlu sunnah wal jama'ah</i>	Islam	Kanan
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Islam	Islam	Kanan
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Pancasila dan UUD 1945	Nasionalis-Sekuler	Kiri
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	Pancasila dan bersifat moderat dan majemuk	<i>Catch-all Party</i>	Tengah
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Pancasila dan UUD 1945	Nasionalis-Sekuler	Kiri
7	Partai Demokrat	Pancasila/ Nasionalis-Religius	<i>Catch-all Party</i>	Tengah
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Pancasila dan berakar pada moral agama	Islam	Kanan
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Islam	Islam	Kanan
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Pancasila bersifat Nasionalis Religius	<i>Catch-all Party</i>	Tengah
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	Islam	Islam	Kanan
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Pancasila dan UUD 1945	Nasionalis-Sekuler	Kiri

Sumber: Diolah dari AD/ART partai masing-masing.

Dari tabel di atas, penulis melihat bahwa peta ideologi partai-partai tersebut sebenarnya berlandaskan pada tiga variasi ideologi: *Pertama*, Pancasila (meliputi juga UUD 1945). Partai-partai yang berlandaskan pada hal tersebut merupakan partai dengan garis ideologis Nasionalis Sekuler. Partai yang masuk dalam kategori ini

adalah Partai Nasdem, PDI-Perjuangan, Gerindra, dan PKPI. *Kedua*, berasas/ideologikan Islam, seperti PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN. Terdapat hal menarik dalam memetakan dan mengidentifikasi ideologi PKB dan PAN. Meskipun kedua partai tersebut dengan jelas menyatakan ideologinya Pancasila, namun masih melandaskan nilai khas

keagamaannya, seperti PKB dalam AD/ART-nya menyebutkan bahwa:

“Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljama’ah.”

Sedangkan PAN dalam AD/ART-nya menyatakan bahwa “Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.” Oleh karena itu, penulis memasukkan PKB dan PAN sebagai partai politik Islam; *Ketiga*, kombinasi antar keduanya (Pancasila

dan Islam) yang disebutkan –oleh partai-partai dalam AD/ART– dengan istilah Nasionalis Religius. Partai-partai dalam kategori ini merupakan partai Tengah atau *cacth-all party*, dikarenakan dalam format ini suatu partai menerima pluralisme, bersikap inklusif, dan non-sektarian (Imawan, 2004:11.). Partai-partai yang termasuk dalam kategori ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura.

Berdasarkan pemetaan di atas, penulis menemukan tiga pembilahan partai-partai berdasarkan jarak ideologis dan *positioning* ideologi-nya, yaitu “Kiri” (Nasionalis-Sekuler), “Kanan” (Islam) dan “Tengah” (*Cacth-all Party*). Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jarak Ideologis dan *Positioning* Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014

Partai Kiri (Nasionalis-Sekuler)	Partai Tengah (<i>Catch-all Party</i>)	Partai Kanan (Islam)
PDI-P	Partai Golkar	PKS
Partai Gerindra	Partai Demokrat	PPP
PKPI	Partai Hanura	PBB
Partai NasDem		PKB
		PAN

Skema Pergeseran *Positioning* Ideologi Partai-partai Politik

Pada bagian ini, penulis mencoba mendiskusikan peta pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Sebelum melihat fenomena tersebut, penting meletakkan di mana *positioning* awal ideologi masing-masing partai. Oleh karena itu, tabel 2 yang penulis sajikan di atas, menjadi pegangan dan landasan utama dalam melihat *positioning* awal, yang berguna untuk menggambarkan fenomena pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik pada pemilu 2014 ini.

Dalam membaca fenomena pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik, hal demikian sudah jauh hari disampaikan oleh Anthony Downs. Downs menyatakan bahwa setiap partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu, memiliki daya mobilitas yang tinggi untuk melakukan pergeseran *positioning* ideologinya (Noris, 1999:32), contohnya membuat kebijakan dengan menabrak atau

mengenyampingkan rambu-rambu ideologi partainya. Hal itu dimotivasi pilihan rasional (*rational choice*) untuk mendapat keuntungan yang besar pada momentum tersebut. Bahkan, partai-partai dapat dengan mudah menempatkan diri di titik manapun dalam kontinum *positioning* ideologinya, dengan maksud dan tujuan menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Partai-partai melakukan hal itu, dikarenakan para elitnya tidak terlalu peduli soal ideologi partai atau bagaimana seharusnya partai yang ideologis itu bertindak. Mereka lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan jangka pendek (Klingemann, 2000:41)

Berdasarkan kajian dan riset yang penulis lakukan, penulis coba memetakan pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014 dengan membedakan tiga pola pergeseran *positioning* ideologinya, yaitu Konservatif, Konservatis Progresif dan Ekstremis. Namun demikian pola-pola tersebut, hanya berlaku pada partai dengan

positioning ideologi “Kiri” atau “Kanan”, sedangkan *positioning* “Tengah” tidak mengalami pergeseran karena berada pada

comfort zone sebagai *cacth-all party*.

Berikut matriks tiga pola pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik.

Matriks 1. Tipe dan Indikator Pergeseran Positioning Ideologi Partai

Tipe/ Indikator	Manifestasi Ideologi Partai	Eksklusif/Inklusif	Komitmen Aliansi/Koalisi
(1) Konservatif (Status Quo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi Ideologi: Berpegang teguh kepada Ideologinya dan ada kecenderungan konservatif (mempertahankan status quo ideologinya). 2. Totalitas Memperjuangkan Negara Ideal: Partai Islam menghendaki Indonesia menjadi negara Islam. Partai Nasionalis Sekuler ingin terciptanya negara yang benar-benar sekuler. 3. Penolakan Gagasan: Partai Islam sangat menolak gagasan sekularisasi negara, Partai Nasionalis Sekuler sangat menolak gagasan islamisasi negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan: Partai Islam tidak akan menerima non-muslim sebagai anggotanya, begitu juga Partai Nasionalis Sekuler tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi anggotanya. 2. Pengurus: Partai Islam tidak akan menerima non-muslim sebagai pengurus partainya, begitu juga Partai Nasionalis Sekuler tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi pengurusnya. 3. Caleg: Partai Islam tidak menerima non-muslim sebagai calegnya, dan Partai Nasionalis Sekuler juga tidak akan menerima seorang muslim "radikal" menjadi calegnya. 	Partai Islam dengan tipikal Konservatif tidak akan bersedia beraliansi atau berkoalisi dengan Partai Nasionalis Sekuler, begitu juga sebaliknya.

(2) Konservatis- Progresif (Moderat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi Ideologi: Melakukan kompromisasi ideologi terhadap konstelasi politik yang berkembang; Peran ideologi partai diminimalisasi jadi tidak sepenuhnya dihilangkan. 2. Totalitas Memperjuangkan Negara Ideal: Partai Islam tidak total (setengah hati) memperjuangkan tegaknya negara Islam, Partai Nasionalis Sekuler tidak total (setengah hati) memperjuangkan negara sekuler. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan: Partai Islam dengan senang hati menerima non-muslim sebagai anggotanya, dan Partai Nasionalis Sekuler juga akan menerima muslim "radikal" sebagai anggota. 2. Pengurus: Partai Islam masih tidak menerima non-muslim sebagai pengurus struktural partai, dan Partai Nasionalis Sekuler juga tidak akan menerima muslim "radikal" sebagai pengurusnya. 3. Caleg: Partai Islam menerima non-muslim sebagai Calegnya, sedangkan Partai Nasionalis Sekuler masih tidak menerima muslim "radikal" sebagai calegnya 	<p>Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai-partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda ideologi namun dengan batasan yang ketat.</p>
(3) Ekstremis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi Ideologi: Ideologi partai direduksi sedemikian rupa, sehingga menjadi tak jelas alias kabur. 2. Totalitas Memperjuangkan Negara Ideal: Partai Islam total tidak memperjuangkan negara Islam, Partai Nasionalis Sekuler juga total tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan: Partai Islam menerima non-muslim sebagai anggotanya, dan Partai Nasionalis Sekuler juga akan menerima muslim "radikal" sebagai anggota. 2. Pengurus: muslim sebagai pengurus struktural partai, tapi masih pada level lokal tidak nasional (DPP) dan Partai Nasionalis Sekuler masih tidak akan 	<p>Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai-partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda ideologi tanpa batasan apapun.</p>

	ingin mewujudkan negara Sekuler.	<p>menerima muslim "radikal" sebagai pengurusnya.</p> <p>3. Caleg: Partai Islam menerima non-muslim sebagai calegnya, sedangkan Partai Nasionalis Sekuler juga akan menerima muslim "radikal" sebagai calegnya.</p>	
--	----------------------------------	---	--

Matrik ini diolah oleh penulis

Pertama, Pola **Konservatif**, yaitu suatu partai yang tidak melakukan pergeseran *positioning* ideologinya. Pola ini penulis sebut juga sebagai pola Status Quo, dikarenakan partai politik dalam posisi ini, sangat kuat memegang teguh asas ideologinya dan sangat konservatis atas status quo partainya. Partai Islam dalam posisi ini sangat menolak sekulerisasi negara, begitu pula halnya dengan Partai Nasionalis Sekuler sangat menolak gagasan Islamisasi negara. Baik Partai Islam maupun Partai Nasionalis Sekuler sama-sama memperjuangkan tegaknya negara ideal menurut pandangan masing-masing, Partai Islam menghendaki Indonesia menjadi negara Islam, sedangkan

Partai Nasionalis Sekuler ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar sekuler. Demikian berlanjut dengan pertentangan yang keras antar keduanya, Partai Islam dalam posisi ini akan menentang berdirinya Negara Sekuler, dan Partai Nasionalis Sekuler akan menentang berdirinya Negara Islam. Dalam pola ini, baik Partai Islam maupun Partai Nasionalis Sekuler sama-sama bersifat eksklusif terdapat keanggotan (kader), pengurus partai, dan calon anggota legislatif (caleg). Misalnya, Partai Islam dalam posisi ini tidak akan menerima keanggotan non-muslim, apalagi duduk sebagai pengurus dan menjadi caleg. Begitu juga dengan Partai Nasionalis Sekuler, tidak akan menjadikan

seorang muslim yang “radikal” sebagai anggota, pengurus apalagi calegnya. Selain itu, ciri dari pola ini berdasarkan pembentukan aliansi atau koalisi, Partai Islam dengan tipikal Konservatif tidak akan bersedia beraliansi atau berkoalisi dengan Partai Nasionalis Sekuler, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks pemilu 2014 ini, penulis tidak menemukan partai-partai yang dapat dimasukkan dalam pola ini.

Kedua, Pola **Konservatis Progresif**, yaitu suatu partai yang melakukan pergerakan atau pergeseran *positioning* ideologinya namun tidak begitu ekstrem. Partai dengan pola ini diduga menghendaki pergeseran *positioning* ideologinya karena ingin melakukan kompromisasi ideologi atas konstelasi politik yang berkembang untuk kepentingan partai dan/atau elitnya. Peran ideologi bagi partai dalam pola ini diminimalisasi namun tidak dihilangkan begitu saja. Contohnya, seperti Partai Islam tidak total (setengah hati) memperjuangkan tegaknya negara Islam, begitu pula Partai Nasionalis Sekuler tidak total (setengah hati) mewujudkan

negara sekuler. Dalam pola ini, Partai Islam maupun Partai Nasionalis Sekuler sudah mulai inklusif (terbuka) terhadap keanggotaan partai, pengurus dan calegnya. Partai-partai Islam akan menerima dengan senang hati keanggotaan non-muslim di dalam partainya dan memperbolehkannya menjadi caleg dari partai Islam ini. Namun non-muslim ini tidak dapat menjadi pengurus struktural di partai yang bersangkutan. Sedikit berbeda dengan Partai Nasionalis Sekuler, mereka akan menerima keanggotaan seorang muslim “radikal” namun tidak akan menjadikannya sebagai pengurus dan caleg partai yang bersangkutan. Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai-partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda ideologi namun dengan batasan yang ketat. Penulis mengkategorikan PKS dan PDI-P sebagai partai yang melakukan pergeseran *positioning* ideologi pada pola Konservatis Progresif.

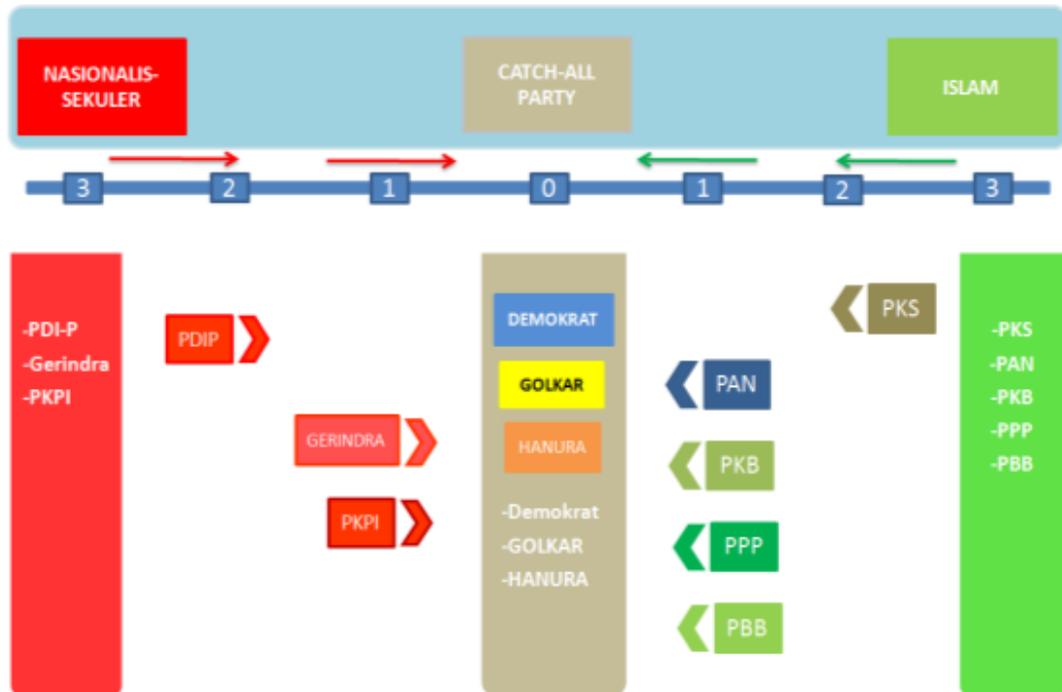
Ketiga, Pola **Ekstremis**, yaitu suatu partai yang melakukan pergerakan atau pergeseran

positioning ideologinya dengan ekstrem ke tengah dan/atau berubah bentuk menjadi *catch-all party*. Partai dengan pola ini melakukan reduksi (pengenduran) atas ideologi partainya sendiri. Oleh karena itu, *positioning* ideologi partai-partai tidak jelas alias kabur. Dalam pola ini, Partai Islam sangat total tidak memperjuangkan tegaknya negara Islam, begitu pula Partai Nasionalis Sekuler sangat total tidak ingin mewujudkan negara sekuler. Partai Islam maupun Partai Nasionalis Sekuler sudah cukup inklusif (terbuka) terhadap keanggotaan partai, pengurus dan calegnya. Partai-partai Islam menerima keanggotaan, pengurus, dan caleg dari non-muslim, namun masih terdapat batasan mengenai penerimaan di kepengurusan pada tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP), mereka (non-muslim) hanya

dapat menduduki jabatan kepengurusan struktural di tingkat lokal, dan itupun di daerah yang muslimnya minoritas. Dalam pembentukan aliansi atau koalisi, partai-partai dalam posisi ini terbuka koalisi dengan partai-partai yang berbeda ideologi tanpa batasan apapun. Misalnya, partai-partai Islam terlihat mengalami pereduksian ideologi. Partai dijadikan sekedar kendaraan bagi para elitnya dalam meraih jabatan-jabatan publik (Klingemann, 2000:41). Partai-partai peserta pemilu 2014 yang masuk dalam kategori pola ini adalah PPP, PBB, PKB, PAN, Gerindra, dan PKPI.

Berdasarkan paparan di atas, mari kita lihat skema pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik pada pemilu 2014 di bawah ini.

Gambar 2. Skema Pergeseran *Positioning* Ideologi Partai-partai Politik



Skema ini terinspirasi dari Marcus Mietzner (2008)

Dari skema di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa partai-partai yang berada pada sisi “Kiri” (Nasionalis-Sekuler) maupun “Kanan” (Islam) mengalami pergeseran *positioning* ideologinya ke arah tengah. Namun, tidak demikian dengan partai “Tengah” (*Catch-all Party*). Pada gambar di atas, terdapat angka 3 (tiga) yang menandakan *positioning* ideologinya berpola Konservatif, yang mempertahankan status quo partainya sebagai partai ideologis. Dalam konteks pemilu 2014 ini, penulis tidak mendapatkan

partai yang cocok untuk masuk dalam kategori ini.

Pada angka 2 (dua), menunjukkan bahwa *positioning* ideologinya mulai mengalami pergeseran, penulis menyebutnya dengan istilah pola Konservatis-Progresif, melakukan pergeseran namun tidak begitu ekstrem, masih terhitung moderat. Seperti ungkapan Mietzner tentang partai politik Islam

“... have gradually shifted towards the centre. Remodelling themselves as moderate and pluralist organisations, Islamic parties have formed coalitions with centrist parties at the national and local levels (Mietzner, 2008:433.).”

Partai-partai yang masuk dalam pola ini adalah PKS dan PDI-Perjuangan.

Sedangkan, angka 1 (satu) menunjukkan bahwa suatu partai melakukan pergeseran *positioning* ideologinya begitu tajam, oleh karena itu penulis menyebutkan dengan istilah pola Ekstremis. Partai-partai yang dalam kategori ini adalah PKB, PAN, PBB, PPP, Gerindra dan PKPI. Selaras dengan itu, Giovanni Sartori mengemukakan bahwa di dalam situasi multipartai yang begitu terpolarisasi, partai-partai bergerak secara tajam dan ekstrem ke arah *comfort zone* –bagi mereka– demi kepentingan dan tujuannya masing-masing (Sartori, 2000:403).

Kesimpulan

Dari karya ini, setidaknya kita dapat melihat “Bagaimana peta ideologi partai politik peserta pemilu 2014 berdasarkan AD/ART partainya? Dan bagaimana gambaran pergeseran *positioning* ideologi-nya

dalam menghadapi pemilu 2014?” Catatan berikut ini merupakan kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada pemilu 2014, sistem kepartaian di Indonesia masih bermodel pluralisme ekstrem, ditandai dengan 12 partai politik peserta pemilu nasional dan 3 partai lokal di Aceh. Dalam memetakan partai-partai politik, penulis menggunakan pemetaan garis berdasarkan pertentangan ideologis, Nasionalis-Sekuler versus Islamis yang menghasilkan tiga variasi ideologi: *Pertama*, ideologi Pancasila yang berdiri pada garis ideologis Nasionalis-Sekuler, seperti PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Nasdem dan PKPI. *Kedua*, berdasar/ideologikan Islam, seperti PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN. *Ketiga*, berlandaskan pada ideologi Nasionalis-Religius, yang berdiri pada posisi tengah atau *cacth-all party*, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura.

Berdasarkan pemetaan di atas, penulis menemukan tiga bentuk pembilahan partai-partai politik dengan melihat jarak ideologis dan

positioning ideologi-nya, yaitu “Kiri” (Nasionalis Sekuler), “Kanan” (Islam) dan “Tengah” (*Cacth-all Party*). Dalam menghadapi pemilu 2014 ini, partai-partai politik yang berada pada sisi “Kiri” (Nasionalis Sekuler) maupun “Kanan” (Islam) mengalami pergeseran *positioning* ideologi ke arah tengah. Namun, tidak demikian dengan partai “Tengah” (*Cacth-all Party*). Pergeseran *positioning* ideologi partai dapat dibedakan menjadi tiga pola yaitu *Pertama*, Konservatif yang mempertahankan status quo partainya sebagai partai ideologis. *Kedua*, Konservatis Progresif melakukan pergeseran, namun tidak begitu ekstrem, masih terhitung moderat, contohnya PKS dan PDI-P. *Ketiga*, pola Ekstremis, di mana partai melakukan pergeseran *positioning* ideologi begitu tajam, contohnya PKB, PAN, PBB, PPP, Gerindra dan PKPI.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul. ed. (1996). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta, PT Tiara Wacana.
- Budiardjo, Miriam. ed. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bull, Victoria. (2008). *Oxford Learner's Pocket Dictinory*. New York: Oxford University Press.
- Dhakidae, Daniel. (1999). “Partai-partai Politik Indonesia: Sebuah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-patahan Sejarah” dalam Tim Litbang Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Jakarta: Kompas,
- Djojosoekarto, Agung dan Sandjaja, Utama., ed. (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Model, Strategi dan Praktik*. Jakarta: Kemitraan.
- Evans, Geoffrey dan Noris, Pippa. ed. (1999). *Critical Elections: British Parties and Voters in Long-Term Perspective*. London: Sage Publication Ltd.

- Evans, Kevin Raymond. (2003). *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Arise Concultance.
- Feith, Herbert dan Castle, Lance. (1998). "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar" dalam Miriam Budiardjo ed. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Imawan, Riswandha. "Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri," Naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM yang disampaikan pada 4 September 2004.
- Irawan, I Ketut Putra. dkk. (2008). "Membangun Model-model Transformasi Kepartaian di Indonesia," dalam Agung Djojosoekarto dan Utama Sandjaja. ed., *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Model, Strategi dan Praktik*. Jakarta: Kemitraan.
- Karim, M. Rusli. (1983). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kirchheimer, Otto. (1996). "Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat" dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta, PT Tiara Wacana.
- Klingemann, Hans-Dieter. dkk. (2000). *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*. Penerjemah Sigit Jatmika. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Macridis, Roy C. (1996). "Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-partai," dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta, PT Tiara Wacana.
- Mietzner, Marcus. "Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the post-Soeharto era: From Centrifugal to Centripetal

- Inter-Party Competition,” *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39 No. 3 (Oktober, 2008)
- Noris. (1999). Pippa “New Politicians? Changes in Party Competition at Westminster” dalam Geoffrey Evans dan Pippa Noris ed., *Critical Elections: British Parties and Voters in Long-Term Perspective*. London: Sage Publication Ltd.
- Pahlevi, Indra. (2003). “Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Studi Terhadap Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004,” dalam Sali Susiana, ed., *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: P3I Setjen DPR RI,
- Pamungkas, Sigit. (2012). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare.
- “PKS Usung Caleg Pendeta Kristen.” *voa-islam.com*, 10 Januari 2014. dari <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/04/23/24125/>
- Purwoko, Dwi. dkk (2001). *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler*. Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi.
- Ratnawati (2006). *Sistem Kepartaian di Era Transisi*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Politik Fisipol UGM.
- Sartori, Giovanni. (1972). “European Political Parties: The Case of Polarized Pluralisme,” dalam Joseph LaPalombara dan Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*. New Jersey: Princeton University Press,
- Sugiono, Muhadi dan Mas’udi, Wawan. (2008). “Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009” dalam Laporan Penelitian Hibah Riset FISIPOL UGM.
- Susiana, Sali. ed. (2003) *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: P3I Setjen DPR RI.
- Tan, Paige Johnson. “Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes and Implications,”

*Journal of Contemporary
Southeast Asia*, Vol. 24, No.
3 (Desember 2002).

Taufik, Muhammad. “Dialektika
Partai Politik Baru di

Indonesia,” dalam *Referensi*
edisi 1, (t.b. 2010): h. 6.

Tebba, Sudirman. (2001). *Islam
Pasca Orde Baru*.
Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya,